

# BUDAYA RUANG DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS MIKRO (Studi Kasus di Pandeglang)

Agus Lukman Hakim  
Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten  
Email: aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id

## ARTIKEL INFO

## ABSTRACT

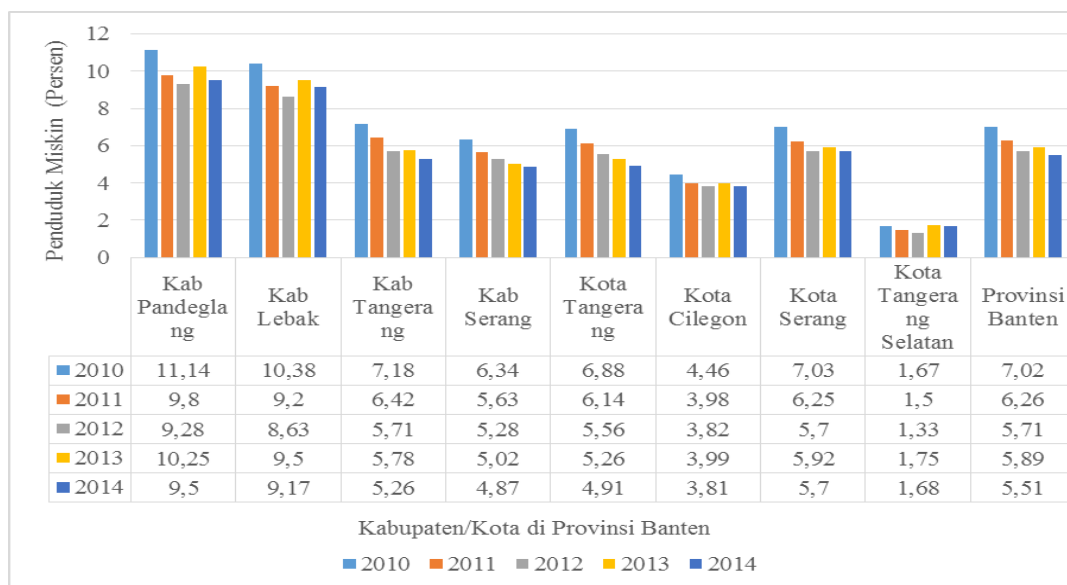
**Keywords:** Pandeglang Regency, Population Density, Space Culture, Micro Business.

Regency is included in the category of underdeveloped regions and has the highest poverty rate in Banten Province. Therefore, the Regional Government of Pandeglang together with the central government has sought to develop the potential of the region with various policies, one of which is the Development of the Special Economic Zone of Tanjung Lesung.

Various government policies and the needs of the community, the private sector towards residential space, pushed the northern and southern regions of Pandeglang to experience greater population density. This condition raises a new culture from the local community, namely making the residence and area adjacent to the road as a micro business. The micro business continues to be developed by the government, although it is contrary to the policy of the Pandeglang Regency RTRW.

## PENDAHULUAN

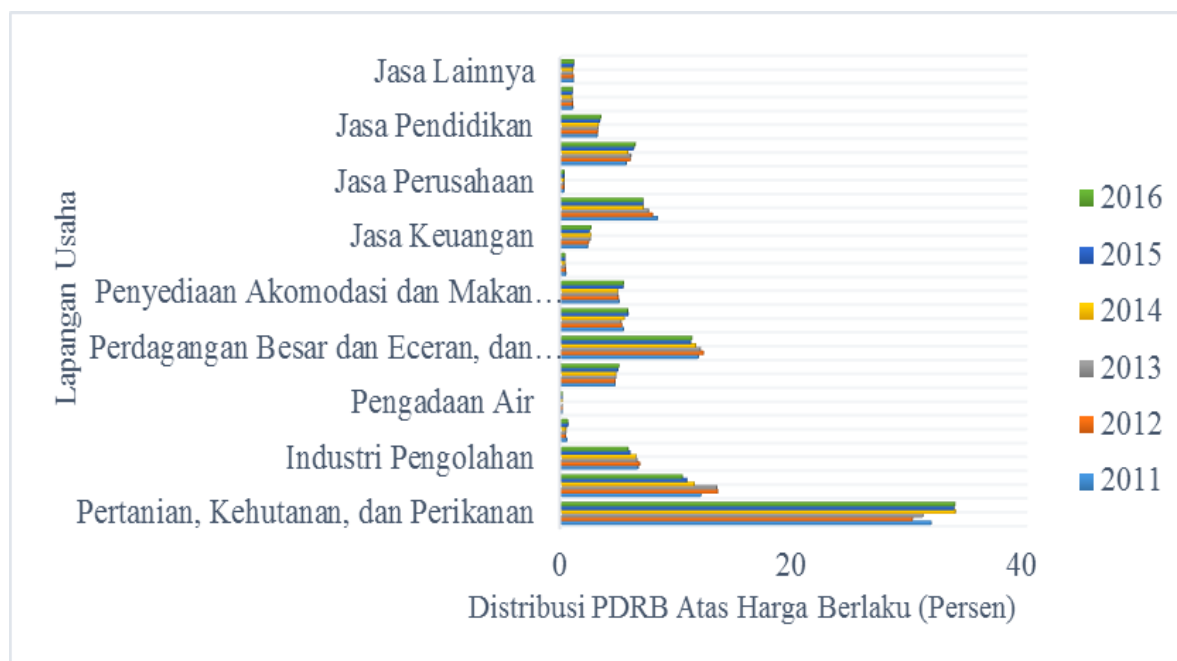
Kabupaten Pandeglang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah khususnya di Bidang Pertanian dan Pariwisata. Potensi tersebut diindikasikan dengan diperolehnya penghargaan dalam bentuk peningkatan produksi beras nasional (P2BN) tahun 2012, Adhikarya pangan nusantara tahun 2014 dan 2015 (Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang 2015). Pada bidang pariwisata, Kabupaten Pandeglang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Banten, yaitu 230 km (Bappeda Kabupaten Pandeglang 2016). Kedua potensi tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Kabupaten Pandeglang. Indikasinya adalah Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Banten dan rata-rata kemiskinan di tingkat provinsi seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010-2014  
Sumber: BPS Provinsi Banten 2016

Kondisi kemiskinan tersebut berdampak pada keberadaan Kabupaten Pandeglang yang termasuk dalam katagori kabupaten tertinggal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Ketertinggalan Kabupaten Pandeglang dapat terlihat dari perkembangan jumlah desa tertinggal tahun 2006 sebanyak 141 desa/kelurahan (42,09 %) dari 322 desa/kelurahan di Kabupaten Pandeglang sesuai SK Menteri PDT Nomor: B.038/M-PDT/IV/2006 tanggal 17 April 2006 mengacu data Podes 2005. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Bupati Pandeglang telah melakukan kebijakan pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2011-2016 secara terintegrasi dan berkelanjutan minimal 10% per tahun (14 desa/kelurahan) sesuai Keputusan Bupati Keputusan Bupati Pandeglang No. 140/Kep.230-Huk/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penetapan Kelurahan dan Desa Tertinggal Prioritas Tahun 2011 dan kebijakan tersebut dilanjutkan hingga tahun 2016. Hasil evaluasi Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDT No. 030 tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dengan mengacu pada data Podes 2014, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal karena jumlah desa/kelurahan tertinggal pada tahun 2016 mengalami kenaikan berjumlah 179 (52,8%) dari 339 desa dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang.

Upaya Pemda Kabupaten Pandeglang mengurangi atau bahkan menghilangkan desa tertinggal telah dijalankan namun belum memiliki dampak signifikan bagi pembangunan wilayah. Hal ini karena kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor unggulan bagi PDRB cenderung tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan distribusi PDRB per sektor selama periode 2011-2016 (lima tahun), kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan kelautan 31,90 % (2011), 30,30% (2012), 31,20% (2013), 34% (2014), 33,48 (2015), 33,94 (2016) seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi PDRB Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha  
Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang 2016a

Pengembangan sektor pertanian sebagai ujung tombak perekonomian di Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pandeglang dengan melakukan kajian, pendataan serta mengembangkan komoditas unggulan. Salah satunya dengan dengan mengembangkan komoditas padi sawah sebagai upaya mempertahankan keunggulan Kabupaten Pandeglang sebagai lumbung pangan nasional.

Potensi lain yang sedang dikembangkan Pemda Kabupaten Pandeglang adalah pariwisata. Pengembangan pariwisata mendapat dukungan dari pihak swasta, khususnya PT. Banten West Java (BWJ) *Tourism Development Corporation*, dengan mengajukan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2011. Ajuan tersebut mendapat respon pemerintah pusat karena relevan dengan desain program *Master Plan* Percepatan Perekonomian Indonesia (MP3EI) yang

sedang gencar digulirkan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 26 Tahun 2012 yang menetapkan wilayah Tanjung Lesung Kecamatan Panimbang sebagai lokasi KEK, dengan luas area 1500 hektar. KEK Tanjung Lesung merupakan upaya mendongkakan pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan khususnya Kabupaten Pandeglang (Bappeda Kabupaten Pandeglang 2016).

Bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap KEK dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 03 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, yaitu jalan tol Ciujung, Serang–Panimbang dengan panjang 83 km dan Bandar Udara Banten Selatan yang terletak di Kecamatan Panimbang dan Sobang. Salah satu langkah implementasi dari proyek strategis nasional tersebut, Gubernur Provinsi Banten telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 598/Kep.387-Huk/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, yaitu Kecamatan Panimbang meliputi desa Panimbangjaya, Mekar Jaya, Gombong; Kecamatan Sukaresmi, meliputi: Desa Sukaresmi dan Pasir Kadu; Kecamatan Patia meliputi: Desa Patia, Pasir Gadung, Simpang Tiga; Kecamatan Sindangresmi meliputi: Desa Kadumelati dan Pasir Durung; Kecamatan Picung meliputi: Desa Bungurcopong, Pasir Sedang, Kadupandak, Cililitan; Kecamatan Bojong meliputi: Cijakan. Pemerintah Provinsi Banten juga berencana melakukan reaktivasi kereta api jalur Saketi-Bayah sekitar 88,9 km dan reaktivasi kereta Labuan-Rangkas Bitung sepanjang 56 km untuk memudahkan akses masyarakat di daerah-daerah terisolir di Kabupaten Pandeglang (Dinas PUPR Kab Pandeglang 2017).

Banyaknya intervensi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi diharapkan mampu mengubah kondisi Kabupaten Pandeglang menjadi daerah yang maju. Implikasinya berdampak pada perubahan penggunaan lahan (*land use*) akibat adanya proyek pembangunan pemerintah serta keinginan masyarakat untuk membuat pemukiman di lokasi-lokasi strategis. Hasil kajian evaluasi RTRW menunjukkan penggunaan lahan pemukiman yang tidak sesuai fungsi peruntukan ruang dalam rencana pola ruang pada fungsi kawasan lindung seluas 1.305 Ha dan kawasan budidaya sekitar 7.810 Ha. Total konversi lahan yang berubah fungsi ke pemukiman adalah lahan sekitar 9.115 Ha. Terdapat simpangan pemanfaatan ruang berupa ketidaksesuaian antara Perda No. 03 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031 dengan pemanfaatan ruang di lapangan, yaitu sebesar 15 persen (Dinas PUPR Kab. Pandeglang 2017). Simpangan tersebut tak lepas dari pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang (2016a), Perkembangan konversi lahan paling besar didominasi lahan kehutanan, pesawahan dan perkebunan. Konversi lahan tersebut terlihat dari perbandingan luas kehutanan sebesar 96.887 hektar (BPS Kabupaten Pandeglang 2010), yang terdiri dari Luas hutan rakyat sebesar 11.925 hektar (4,28% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang) dan luas hutan negara 84.962 hektar (30,52% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang). Pada tahun 2015, luas hutan rakyat bertambah menjadi 9,84% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang dan luas hutan negara berkurang menjadi 20,57% dari luas Kabupaten Pandeglang. Perubahan penggunaan lahan juga terjadi pada area sawah. Luas area pesawahan tahun 2010 semula 54.379 hektar (luas sawah irigasi 22.044 hektar / 9,08% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang) dan luas pesawahan non irigasi 32.695 hektar (11,61% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang). Pada tahun 2015 terjadi pengurangan luas pesawahan irigasi 8,03% dan luas pesawahan non irigasi bertambah menjadi 11,90 % dari luas Kabupaten Pandeglang. Pada area perkebunan juga terjadi perubahan, tahun 2010 luas area perkebunan 15.005 hektar (5,39% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang) mengalami pengurangan menjadi 5,02% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang (BPS Kabupaten Pandeglang 2016a). Pergeseran penggunaan lahan tersebut tidak lepas dari kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pemukiman, investasi pihak swasta serta intervensi kebijakan pemerintah di Kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut berdampak pada upaya masyarakat lokal mengembangkan bisnis di Wilayah yang padat penduduk. Klusterisasi wilayah padat penduduk tersebut berada di wilayah utara kabupaten Pandeglang seperti Kecamatan Majasari dan Kecamatan Pandeglang dan wilayah selatan Kabupaten Pandeglang seperti Kecamatan Labuan. Fenomena tersebut merupakan upaya masyarakat dalam menyikapi perubahan landscape ruang akibat kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang.

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang, BPS Provinsi Banten, Bappeda Kabupaten Pandeglang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.

Data primer menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan wawancara terbuka dengan stakeholder terkait seperti Pemda Kabupaten Pandeglang, Masyarakat lokal, LSM dan akademisi. Adapun data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan content analysis (analisis isi) dokumen (Somantri 2005; Fraenkel *et al* 1996; Sebo 1996)

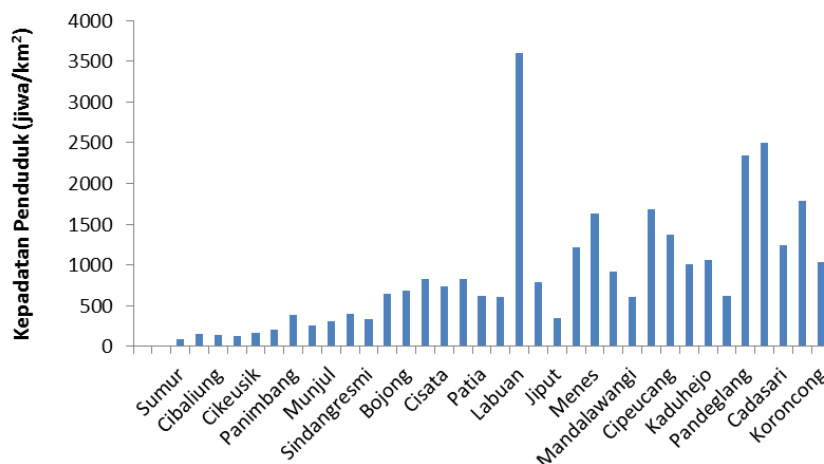
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Perkembangan Penduduk dan Ketenagakerjaan

#### Perkembangan Penduduk

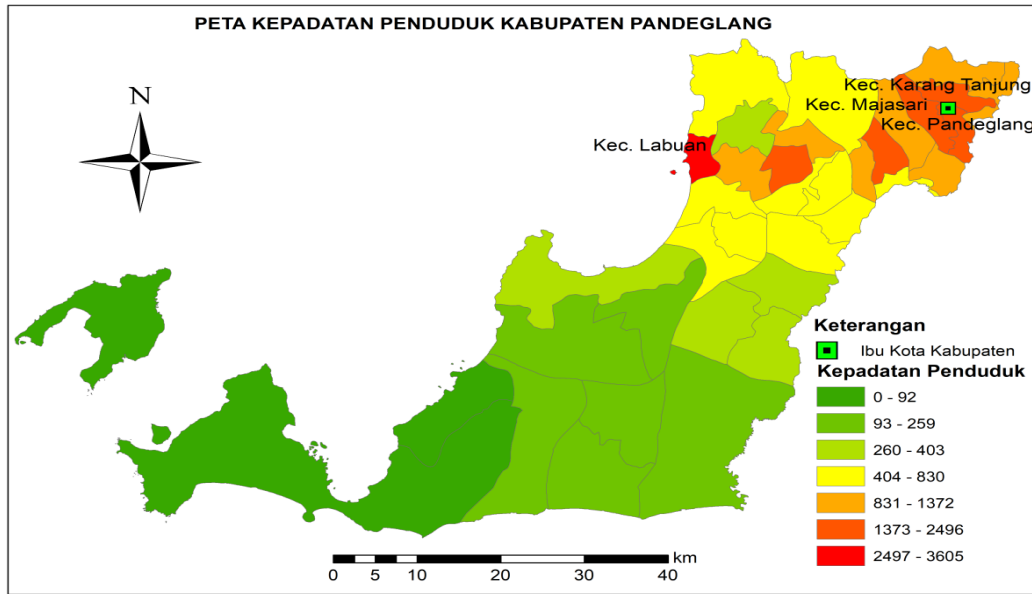
Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.200.512 jiwa, yang tersebar di 35 Kecamatan. Penyebarannya tidak merata, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Labuan sebanyak 56.724 jiwa dan paling tersedikit berada di Kecamatan Keroncong 18.642 jiwa (BPS Kabupaten Pandeglang 2016a). Beberapa kecamatan memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu Kecamatan Labuan 56.724 jiwa, Kecamatan Panimbang 51.382 jiwa, Kecamatan Majasari 49.075 jiwa dan Kecamatan Cikeusik 53.113 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di beberapa Kecamatan tersebut karena Kecamatan Majasari berada di Wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan ibukota Kabupaten. Kecamatan Cikeusik merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak bagian selatan serta wilayah pertanian dan pariwisata. Kecamatan Labuan merupakan wilayah penghubung menuju Pandeglang utara dan selatan. Kecamatan Panimbang merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai KEK Tanjung Lesung dan merupakan kawasan minapolitan. Secara demografi, penduduk di Kecamatan Panimbang berasal dari ekstrasmigran dan nelayan yang berasal dari wilayah Indramayu, Cirebon dan suku bugis.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan paling besar adalah Kecamatan Labuan  $3.605/\text{Km}^2$  karena daerah strategis sekaligus lokasi transit penghubung wilayah utara dan selatan Pandeglang. Sarana transportasi tersedia 24 jam, terdapat terminal bus penghubung Pandeglang-Serang dan Tangerang serta terdapat sarana transportasi menuju lokasi wisata pantai Carita dan Anyer. Kecamatan Labuan juga tersedia fasilitas hotel, pasar, bank, fasilitas pendidikan (dari TK hingga SLTA) dan kesehatan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Majasari sebesar  $2.496 \text{ jiwa}/\text{Km}^2$  dan Kecamatan Pandeglang  $2.346 \text{ jiwa}/\text{Km}^2$ . Kepadatan yang besar tersebut karena kedua kecamatan tersebut berada di pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang dan kantor perwakilan dinas/instansi melakukan kegiatan di Kabupaten Pandeglang. Sebaran kepadatan penduduk dijelaskan dalam Gambar 3 dan 4.



Gambar 3. Jumlah kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Pandeglang

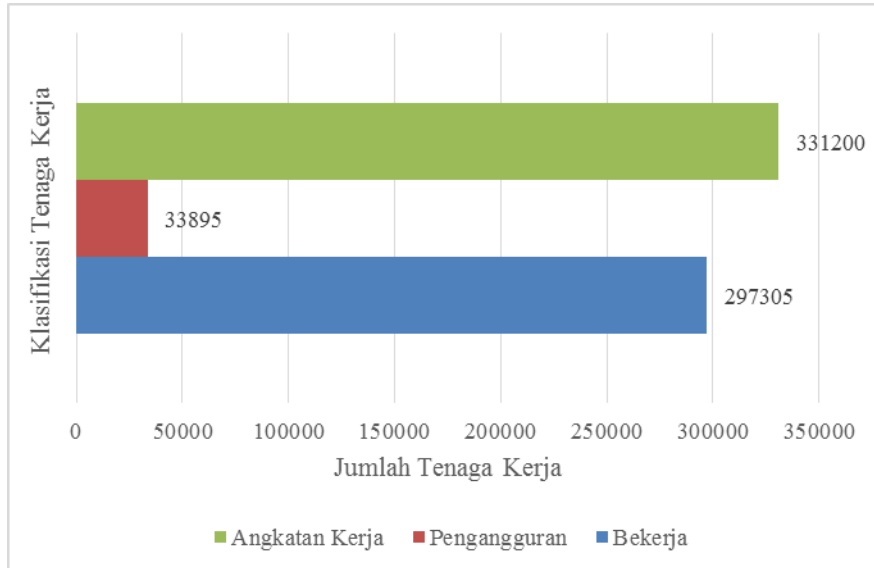
Sumber: BPS Kab. Pandeglang 2016a



Gambar 4. Tingkat kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Pandeglang  
Sumber: BPS Kab. Pandeglang 2016a

### Ketenagakerjaan dan Lapangan Usaha

Kabupaten Pandeglang sebagai daerah yang memiliki sumberdaya alam yang berlimpah memiliki tantangan di bidang ketenagakerjaan. Jumlah angkatan kerja yang usianya di atas 15 tahun mencapai 331.200 orang, terdiri dari 297.305 orang telah bekerja dan 33.895 orang masih menganggur (BPS Kab. Pandeglang 2016a), seperti dijelaskan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Jumlah angkatan kerja, pengangguran dan yang bekerja  
Sumber: BPS Kab. Pandeglang 2016a

Adapun sektor yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 masih didominasi sektor pertanian 41%, selanjutnya perdagangan 24,1%, jasa kemasyarakatan 13%, industri pengolahan 8,1%, sisanya lapangan usaha di bidang lainnya (BPS Kab. Pandeglang 2016a). Penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang masih sangat tergantung pada sektor pertanian karena memiliki lahan pertanian yang potensial dan tenaga kerja yang kompeten. Hal tersebut dijelaskan Gambar 6.



Gambar 6. Lapangan usaha di Kabupaten Pandeglang  
Sumber: BPS Kab. Pandeglang 2016

### Budaya Pemanfaatan Ruang

Perkembangan kepadatan penduduk masih tersentral di wilayah perkotaan. Hal tersebut karena kota memiliki daya tarik yang besar dibandingkan perdesaan. Kepadatan penduduk di bagian utara Kabupaten Pandeglang berada di Kecamatan Pandeglang, Majasari dan Karang Tanjung (BPS Kabupaten Pandeglang 2016a). Kepadatan penduduk pada ketiga kecamatan tersebut karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang terletak di Kecamatan Pandeglang sehingga menjadi daya tarik untuk memperoleh peluang kerja maupun mengembangkan usaha/bisnis. Faktor iklim yang sejuk dan kedekatan dengan lokasi pariwisata seperti pemandian air panas Cisolong dan Cikoromoy menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat yang ingin menetap. Kepadatan penduduk didominasi oleh kedatangan pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemda Kabupaten Pandeglang, pegawai pemerintah dan swasta dari instansi/perusahaan yang membuka cabang di pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang.

Banyaknya migran yang masuk mencari pekerjaan dari luar Kabupaten Pandeglang atau membuka bisnis seperti dari kalangan etnis Cina dan Padang di wilayah pusat pemerintahan menjadikan kekegatan masyarakat setempat karena peluang kerja dan bisnis makin kecil sementara persaingan mencari pekerjaan/bisnis makin besar. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat lokal (asli kelahiran Pandeglang) membangun budaya baru, yaitu mengalihfungsikan rumah yang berada di dekat jalan raya, pusat keramaian dan padat penduduk menjadi warung atau toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako dan warung makan.

Kepadatan penduduk pada wilayah selatan Kabupaten Pandeglang terjadi di Kecamatan Labuan dengan perbandingan kepadatan 3.605/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kecamatan Labuan juga terjadi karena migrasi penduduk dari luar Kabupaten Pandeglang ke Kecamatan Labuan akibat adanya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah menyerap angkatan kerja yang cukup besar baik dari lokal maupun berasal dari Luar Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.700 orang. Daya tarik migrasi ke Kecamatan Labuan juga karena keberadaan Kecamatan Labuan berada di lokasi strategis yang berbatasan langsung lokasi pariwisata Carita dan Anyer serta Kecamatan Panimbang sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai KEK Tanjung Lesung dan kawasan minapolitan. Faktor pendukung lainnya adalah Kecamatan Labuan memiliki iklim yang sejuk dan kemudahan akses menuju Kabupaten Serang dan Kota Cilegon serta prospek rencana reaktivasi kereta api Rangkasbitung-Labuan.

Kehadiran imigran mendorong penduduk lokal terpacu mencari pekerjaan sehingga rekrutmen karyawan PLTU Labuan menghadapi banyak tekanan dari Pemda Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang, LSM dan mahasiswa untuk mengakomodir tenaga kerja lokal. Penduduk asli Kecamatan Labuan menghadapi semakin sempitnya peluang kerja dan usaha akibat banyaknya imigran yang bekerja dan mengembangkan usaha di Kecamatan Labuan. Kondisi tersebut mendorong sebagian penduduk lokal untuk mengembangkan bisnis dengan menjadikan rumah dan bangunan ruko di samping jalan raya sebagai lokasi usaha, yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang. Hal tersebut diakui oleh Kasi Penelitian, Pengawasan dan Pengendalian Pemmanfaatan Ruang DCKP 2016. "Pada daerah perkotaan banyak usaha yang tidak sesuai pemanfaatan ruang, seperti penggunaan sepadan jalan sebagai bangunan toko/warung yang dilakukan sengaja oleh masyarakat". Kondisi tersebut

diakui oleh akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya, DN. "Pelanggaran RTRW karena masyarakat menangkap peluang bisnis dan belum memahami kebijakan RTRW akibat rendahnya sosialisasi".

Fenomena ini berkembang karena banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh informasi terkait kebijakan perizinan tata ruang. Hal tersebut diakui NH, aktivis LSM Komite Masyarakat untuk Partisipasi dan Transparansi (Kompast). "Sejak ditetapkannya Perda RTRW tahun 2011, belum ada sosialisasi kebijakan pada masyarakat...". Dampak sosialisasi yang rendah, menjadikan masyarakat memiliki persepsi bahwa merubah fungsi rumah sebagai warung atau toko yang berada di bahu jalan diperbolehkan. Kondisi tersebut dibiarkan oleh Pemda Kabupaten Pandeglang mengingat peluang kerja yang masih sedikit serta banyaknya pengangguran sehingga usaha warung atau pertokoan di bahu jalan raya seolah-olah dilegalkan oleh Pemda Pandeglang. Eksistensi Pemda Pandeglang sebagai regulator dan menciptakan sinergisitas antara aktor sering tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kecenderungan pemda memberikan dukungan pada aspek pertumbuhan ekonomi sesuai dengan studi Lisdiyono (2008). Fenomena kegagalan tersebut merupakan fenomena kegagalan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya (Opeyemi 2012). Proses pengabaian ruang yang bertentangan dengan RTRW dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan besar bagi masyarakat terkait dengan kenyamanan wilayah dan kesehatan lingkungan karena hal tersebut bertentangan dengan 2 fungsi ruang, yaitu sebagai alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan), dan kedua; keberlanjutan (prinsip *sustainability*) (Rustiadi dan Hadi 2004).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kepadatan Penduduk di Wilayah utara dan selatan Kabupaten Pandeglang mendorong masyarakat lokal melakukan pola budaya ruang yang baru, yaitu mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan rumah dan lokasi yang berada di sekitar jalan raya.
2. Upaya pengembangan bisnis masyarakat lokal di wilayah padat penduduk tersebut disebabkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan serta banyaknya migrasi penduduk sehingga mendorong masyarakat lokal untuk mempertahankan hidup dan bisa berkompetisi dengan penduduk yang berasal dari wilayah luar.

### Saran

Berdasarkan simpulan diatas, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang perlu melakukan sosialisasi secara intens terkait dengan kebijakan tata ruang di wilayah padat penduduk khususnya Kecamatan Labuan, Karang Tanjung dan pandeglang
2. Pemerintah Daerah Pandeglang perlu memfasilitasi lokasi yang sesuai zonasi tata ruang dan *profitable* dalam pengembangan usaha mikro di wilayah yang padat penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPN] Badan Pertanahan Nasional. 2016. Status RTRW provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jakarta (ID): BPN
- [BPS Kabupaten Pandeglang] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2014. Pandeglang dalam angka. Pandeglang (ID): BPS
- \_\_\_\_\_. 2015. Pandeglang dalam angka. Pandeglang (ID): BPS
- \_\_\_\_\_. 2016a. Pandeglang dalam angka. Pandeglang (ID): BPS
- \_\_\_\_\_. 2016b. Kecamatan dalam angka. Pandeglang (ID): BPS
- [BPS Provinsi Banten] Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2016. Banten dalam angka. Banten (ID): BPS
- [Bappeda Kabupaten Pandeglang] Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pandeglang. 2011. Dokumen penyusunan RTRW Kabupaten Pandeglang. Pandeglang(ID). Bappeda

- 
- [Bappeda Kabupaten Pandeglang] Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pandeglang. 2015. RPJMD Pandeglang 2016-2021. Pandeglang (ID): Bappeda
- \_\_\_\_\_. 2016. Dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Pandeglang kerjasama Bappeda Kabupaten Pandeglang-P4W LPPM IPB Bogor.
- [Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang. 2017. Fakta dan Analisa Penyusunan Dokumen Rancangan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031. Kerjasama Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang- P4W LPPM IPB Bogor.
- Fraenkel JR, Norman EW. 1996. *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Lisdiyono E. 2008. Legislasi Penataan Ruang tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang. [Disertasi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Opeyemi AY. 2012. Empirical Analysis of Resource Curse in Nigeria. *Economics and Management Sciences* 1 (6): 19-25.
- Rustiadi E, Hadi S. 2004. Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang. Makalah Workshop Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Wilayah Secara Berimbang. P4W-IPB dan P3PT. Bogor.
- Sebo RE. 1996. Introduction to tourism textbooks: A descriptive content analysis [Disertasi]. University of Connecticut
- Somantri GR. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*. 9 (2): 57-65.